



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 101 /2021

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMUNGUT (KOLEKTOR) PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya mutasi/alih tugas para Pejabat/Pegawai Pemungut (Kolektor) Pajak Bumi dan Bangunan baik PNS maupun yang non PNS, maka untuk tertib dan lancarnya pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Tabalong, perlu meninjau dan menetapkan kembali Petugas Pemungut (Kolektor) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
 11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 35);
 12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 61);
 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah

Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Petugas Pemungut (Kolektor) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan daftar petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Petugas Pemungut (Kolektor) Kecamatan :
1. mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada Wajib Pajak melalui kolektor Kecamatan dalam Kabupaten Tabalong;
 2. menerima setoran uang hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari para Kepala Desa/Lurah dalam keadaan kotor (bruto) beserta Daftar Setoran Harian (DSH);
 3. dalam jangka waktu 1 kali 24 jam setelah terima uang hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut pada angka 1 di atas Petugas Pemungut (Kolektor) Kecamatan Wajib menyetorkannya per Desa/kelurahan ke Bank Kalimantan Selatan cabang Tanjung atau Bank Kalimantan Selatan cabang Pembantu di Kecamatan yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melampirkan Daftar Setoran dimana jumlah pajak yang disetorkan adalah jumlah kotor (belum dikurangi upah pungut);
- b. Petugas Pemungut (Kolektor) Desa/Kelurahan:
1. meneliti blanko Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), berdasarkan atau sesuai dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong;
 2. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang telah diteliti kepada para Wajib Pajak di Wilayah Desa/Kelurahan masing-masing;
 3. memungut dan melaksanakan penagihan langsung Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bidang Persawahan, Perladangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Perumahan dari para Wajib Pajak di Desa/Kelurahan masing-masing sesuai dengan

SPPT atau DHKP kemudian setiap Wajib Pajak yang telah membayar Pajaknya wajib/harus dicatat dalam Daftar Setoran Harian (DSH) dan ditutup setiap hari;

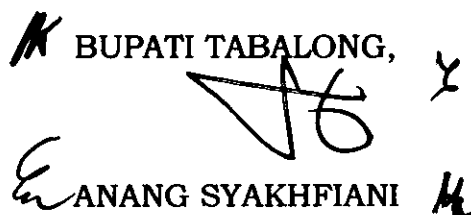
4. setiap hari uang Pajak yang telah dipungut oleh Kolektor Desa atau Kolektor Kelurahan, wajib disetorkan kepada Petugas Pemungut (Kolektor) Kecamatan atau ke tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam jumlah bruto (belum dikurangi upah pungut) disertai dengan Daftar Setoran Harian (DSH); dan
5. untuk memudahkan pengontrolan, Kepala Desa/Lurah supaya membuat administrasi Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

KETIGA : Kepada Petugas Pemungut (Kolektor) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

 **BUPATI TABALONG,**
ANANG SYAKHFIANI

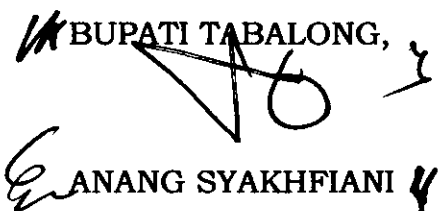
Tembusan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PETUGAS PEMUNGUT (KOLEKTOR) PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI WILAYAH
KECAMATAN SE-KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	KECAMATAN
1.	BURHAN, S.Sos. / 19670603 199703 1 005	KASI TRANTIB	BANUA LAWAS
2.	SARMIN, S.Sos. / 19630805 198903 1 007	KASI PEMBANGUNAN	PUGAAN
3.	MASRUNI / 19680225 198601 1 001	KASI PEMBANGUNAN	KELUA
4.	MULIADI / 19700514 200906 1 004	STAF	MUARA HARUS
5.	ARDIANSYAH / 19660214 200701 1 016	STAF	TANTA
6.	SYAHRANI, A.Md. / 19660212 199103 1 016	KASI PEMBANGUNAN	TANJUNG
7.	Hj. RITA EVIYANI/ 19690129 199803 2 005	KASI PEMBANGUNAN	MURUNG PUDAK
8.	HADIJAH, A.Md. / 19830129 200501 2 013	KASI PEMBANGUNAN	HARUAI
9.	RAMLAN / 19641116 199103 1 008	KASI PEMBANGUNAN	BINTANG ARA
10.	ZAINAL IBAD / 19700105 200701 1 050	BENDAHARA PENERIMAAN	UPAU
11.	NOVERENESIUS / 19671128 200701 1 015	STAF	MUARA UYA
12.	H.ABDUL KARIM,A.Md.Kep / 19650722 198703 1 011	KASI PEMBANGUNAN	JARO

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PETUGAS PEMUNGUT (KOLEKTOR) PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI WILAYAH
KELURAHAN SE-KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	KECAMATAN
1.	SABIRIN MUKHTAR / 19690305 200701 1 030	STAF PADA KELURAHAN PULAU	KELUA
2.	H. ABDULLAH, SE. / 19640204 198701 1 003	LURAH TANJUNG	TANJUNG
3.	AKHMAD JAHYANI, S.AP. / 19790601 199903 1 002	LURAH JANGKUNG	
4.	NOVI HARYADI, SE.Kp./ 19850616 200904 1 002	LURAH AGUNG	
5.	RIFANI PADLI, SE.Kp. / 19840211 200801 1 007	LURAH HIKUN	
6.	ABDUL MUTHALIB, S.Sos. / 19661013 198602 1 002	LURAH SULINGAN	
7.	MUHAMAD RIJANI, S.Pt. / 19730717 199603 1 004	LURAH PEMBATAAN	
8.	ERNA HERNIYATI, S.Sos. / 19791125 201101 1 004	KASI PEMBANGUNAN KELURAHAN BELIMBING	
9.	RAMLI / 19640605 199303 1 010	LURAH BELIMBING RAYA	
10.	RIZKY KURNIADI WIJAYA, S.STP. / 19930114 201609 1 002	LURAH MABUUN	

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

DAFTAR NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PETUGAS PEMUNGUT (KOLEKTOR)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI
WILAYAH DESA SE-KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021


NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KECAMATAN
1.	SAIFULLAH, S.Sos.	KASI PEMERINTAHAN BANUA LAWAS	BANUA LAWAS
2.	MILAWATI	KASI PEMERINTAHAN BUNGIN	
3.	JARI AHMAD, S.Pd.I.	KASI PEMERINTAHAN SEI. DURIAN	
4.	NABHAN	KASI PEMERINTAHAN BATANG BAYU	
5.	ASPIHANNOR, S.Pd.I.	KASI PEMERINTAHAN PEMATANG	
6.	REYDO WAHYUDINNATA	KASI PEMERINTAHAN HARIANG	
7.	RISKA, S.Pd.	KASI PEMERINTAHAN SEI. ANYAR	
8.	BASUKI RAHMAT	KAUR KEUANGAN BANGKILING	
9.	RUSMINAH	KASI PEMERINTAHAN BANGKILING RAYA	
10.	RAHMAT RIJALI HADI, S.Pd.	KAUR KEUANGAN HAPALAH	
11.	BIJURI	KASI PEMERINTAHAN BANUA RANTAU	
12.	JUNAIDI	KASI PEMERINTAHAN PURAI	
13.	TABERI	KASI PEMERINTAHAN HABAU	
14.	MASKUNI	KASI PEMERINTAHAN HABAU HULU	
15.	BURJANI, S.Pd.I.	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN TALAN	
16.	Hj. SRI BUDIARTI	STAF UMUM SEI. RUKAM I	PUGAAN
17.	ARDIANSYAH	KAUR UMUM SEI. RUKAM II	
18.	MUHAMMAD HIDAYAT, S.Sos.	KAUR UMUM HALANGAN	
19.	HAYATULLAH	KAUR UMUM PUGAAN	
20.	FAKHRURRAZI	KAUR UMUM TAMUNTI	
21.	DAUD YAHYA	KASI PEMERINTAHAN JIRAK	
22.	ARPAN RIPANI	SEKDES PAMPANAN	
23.	BAMBANG HERWANTO	KETUA RT KARANGAN PUTIH	KELUA
24.	HENDRA	KASI PEMERINTAHAN BINTURU	
25.	IRWAN SUWANDI	KASI UMUM PALIAT	
26.	MUHAMMAD MISRIYADI, S.Pd	KASI PEMERINTAHAN MASINTAN	
27.	RAHMAT KURNIA	KASI PEMERINTAHAN SEI. BULUH	
28.	NOR ATINA	STAF UMUM PASAR PANAS	
29.	MISRAN	KASI KESRA BAHUNGIN	
30.	JUMIATI	SEKDES TAKULAT	
31.	SAHIBUL FADILLAH, S. Pd.	SEKDES AMPUKUNG	
32.	DEWI RATNA SARI	KAUR UMUM PUDAK SETEGAL	
33.	M. SUPIANOR	STAF UMUM TELAGA ITAR	
34.	SUPIANI	STAF UMUM TANTARINGIN	MUARA HARUS
35.	HASAN	KAUR UMUM HARUS	
36.	ALPIANOR	KASI KESRA MANDUIN	
37.	RUKAYAH	KAUR UMUM MURUNG KARANGAN	
38.	AKHMAD SYARIF	SEKDES MANTUIL	
39.	DEWI RATNASARI	STAF UMUM PADANGIN	
40.	RUSDANSYAH	KASI PEMERINTAHAN MADANG	
41.	ARDIANSYAH	Pjs. KADES WALANGKIR	TANTA
42.	BERHAT	Pjs. KADES PULAU KU'U	
43.	ASDIN LAMBAUSE	KADES TAMIYANG	
44.	DEDY UJANG, SE.	KADES WARUKIN	
45.	H. SOKHIDIN	KADES PADANG PANJANG	
46.	RAHMADI	KADES PADANGIN	
47.	TAJUDDINOOR	Pjs. KADES BARIMBUN	
48.	Drs. AHMAT HARAHAHAP	Pjs. KADES LUK BAYUR	
49.	YULIANSYAH RAWANI, S.AP.	Pjs. KADES MANGKUSIP	
50.	BUDI IRIANTO, S.P.	KADES TANTA	
51.	MUYADI	KADES TANTA HULU	
52.	H. APELANDI, S.Pd, M.Si.	KADES PUAIN KANAN	
53.	H. AKHMAD FAUJI	KADES PAMARANGAN KANAN	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KECAMATAN
54.	MUHAMMAD ANANG ANHAR	KADES MURUNG BARU	
55.	BASUKI RAHMAD	KADES PAMARANGAN KIWA	TANJUNG
56.	Drs. MAHYUDI EFFENDI	Pjs. KADES PUAIN KIWA	
57.	SULASNI, S.Pd.I.	SEKDES SEI PIMPING	
58.	TAJUDDIN	KADES BANYU TAJUN	
59.	YUSNI	KADES MAHE SEBERANG	
60.	WAHYUDIN	KADES GARUNGGUNG	
61.	MAHYUNI	KADES JUAI	
62.	M. JADI	KADES KITANG	
63.	MISRAN	KADES WAYAU	
64.	ARBANI, S.Pd.I.	KADES KAMBITIN	
65.	TAMHUDI	KASI PELAYANAN KAMBITIN RAYA	
66.	SITI RAUDAH	KAUR UMUM KAPAR	MURUNG PUDAK
67.	NURBAYAH	KAUR UMUM MASUKAU	
68.	MUJIONO, SP.	KADES KASIAU	
69.	MUHAMAD AINI	KADES KASIAU RAYA	
70.	EDY RAHMANTO, SE.	KADES MABURAI	
71.	ARJANI	SEKDES HALONG	HARUAI
72.	AGUS SETIAWAN	KASI PEMERINTAHAN HAYUP	
73.	HABIBI	SEKDES NAWIN	
74.	AGUS ERWANYAH	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN BONGKANG	
75.	GUSLIANI	KASI KESRA WIRANG	
76.	JUHRI	KASI PEMERINTAHAN MARINDI	
77.	TAJUDIN NOR ARIFIN	KADES SARADANG	
78.	YULIANA	KASI KESRA LOK BATU	
79.	HIDAYAT	SEKDES KEMBANG KUNING	
80.	DINI ALLIANI	KASI PELAYANAN CATUR KARYA	
81.	HUSAINI	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN SUPUT	
82.	YALENRIANUS WARA	KASI KESRA SURIYAN	
83.	FATUR RAHMAN	KASI PELAYANAN MAHE PASAR	
84.	ANDRA FAHREZA	KAUR UMUM BINTANG ARA	BINTANG ARA
85.	HADIANOR	KAUR UMUM WALING	
86.	JARNI	KAUR UMUM BURUM	
87.	SITI MAISAROH	KASI PEMERINTAHAN ARGO MULYO	
88.	MAJRI	KAUR UMUM USIH	
89.	SAPUAN HIDAYAT	KAUR UMUM BUMI MAKMUR	
90.	MANSURI	KASI PEMERINTAHAN PANAAN	
91.	YONEDI	KAUR UMUM DAMBUNG RAYA	
92.	DIAN JUENDA	KAUR UMUM HEGAR MANAH	
93.	HERDOLIS	KASI UMUM PANGELAK	
94.	SLAMET AHMAT MUKRIDIN	KASI PEMERINTAHAN BILAS	
95.	DADIANSYAH	KASI PEMERINTAHAN KAONG	
96.	RENI ANDINI, A.Md. Keb	KASI KESRA KINARUM	
97.	MARYONO	KASI KESRA MASINGAI I	
98.	ANDIS SUKMA	KASI KESRA MASINGAI II	
99.	H. SAIFUL BAHRI	KAUR UMUM MUARA UYA	MUARA UYA
100.	SITI HASANAH	KASI PEMERINTAHAN PASAR BATU	
101.	MUHAJIR	KASI PEM RIBANG	
102.	SUPIA APRIANI	KASI PEM KAMPUNG BARU	
103.	NASRUL AMIN	KASI PEM NUNDIRING	
104.	HERLIANI	KASI PEMERINTAHAN LUMBANG	
105.	SUBHAN	KASI KESRA UWIE	
106.	WAHYU N.I.	KAUR UMUM SIMPANG LAYUNG	
107.	ANDI NASRULLAH	KASI PEMERINTAHAN SANTUUN	
108.	SYARIPUDIN	KADES MANGKUPUM	
109.	ERNI HARIATI	KASI PEMERINTAHAN PALAPI	
110.	IRWAN	KASI PEMERINTAHAN BINJAI	
111.	MAHRITA	STAF UMUM SALIKUNG	
112.	MUSTOPA KAMALUDDIN	KASI PEMERINTAHAN SEI. KUMAP	
113.	ANIAH	SEKDES SOLAN	JARO
114.	BAYU SYAHDANI	KASI PEMERINTAHAN LANO	
115.	SUGIANOR	KADES TERATAU	
116.	DEDY ARIANTO	SEKDES GARAGATA	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KECAMATAN
117.	DAHRI	KADES PURUI	
118.	WAHYU SYURIA	KASI KESRA NAMUN	
119.	KARIYANA PUTRI UTAMA	KASI PEMERINTAHAN NALUI	
120.	MUJAHIDIN	KADES MUANG	
121.	NORianto	KASI PEMERINTAHAN JARO	

 BUPATI TABALONG,



 ANANG SYAKHFANI 